



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

## POLICY BRIEF

Nomor: 08/PB/PKPEI/VII/2026 - Jakarta, 3 Juli 2026

### SATU DARI TIGA PEKERJAAN BARU DI DUNIA LAHIR DARI PARIWISATA Paradoks Pengelolaan Pariwisata Indonesia Ditengah 7,24 Juta Pengangguran

#### Ringkasan

Dua kenyataan berjalan berdampingan pada paruh pertama tahun 2026, dan keduanya harus dibaca bersama-sama. **Kenyataan pertama:** di dalam negeri, 7,24 juta penduduk usia kerja menganggur menurut Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Februari 2026, dan pada kelompok usia muda 15–24 tahun tingkat penganggurannya mencapai 16,36 persen — hampir satu dari enam orang muda yang siap bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tekanan itu masih terus bertambah: pabrik-pabrik tutup atau pindah ke luar negeri, 23.470 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dalam lima bulan pertama tahun ini, dan Presiden sampai perlu membentuk Satuan Tugas khusus untuk menanganinya. **Kenyataan kedua:** di seluruh dunia, satu dari tiga pekerjaan baru yang tercipta sepanjang tahun 2025 lahir dari sektor pariwisata, dan wisatawan dunia membelanjakan lebih dari US\$2 triliun — sekitar Rp36.750 triliun, atau hampir dua belas kali pendapatan APBN Indonesia dalam setahun.

Brief ini menyampaikan satu kesimpulan mendesak: pada saat sektor manufaktur tertekan dan lapangan kerja formal menyempit, dunia telah menemukan sumber pertumbuhan dan pekerjaan barunya di pariwisata — dan Indonesia, negara dengan kekayaan alam dan budaya peringkat kedua se-ASEAN dan ke-22 dunia, masih mengelolanya setengah hati. Hasilnya tercermin pada posisi Indonesia yang tetap kelima dari enam negara tujuan wisata utama di kawasan. Brief ini menguraikan letak persoalannya, yaitu tiga kebijakan yang tertinggal dari negara tetangga, dan mengusulkan lima langkah perbaikan yang seluruhnya dapat diputuskan Pemerintah sebelum Oktober 2026.

#### I. Dunia Sedang Berpindah: Pariwisata Menopang Ekonomi Global yang Melambat

Perekonomian dunia tahun 2026 diperkirakan hanya tumbuh 2,4 persen. Sektor riil di banyak negara berada di bawah tekanan: permintaan barang melemah, biaya energi meningkat akibat ketegangan geopolitik, dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) serta otomasi mengubah kebutuhan tenaga kerja di pabrik-pabrik dan perkantoran. Di tengah keadaan itu, ada satu sektor yang justru mencatat tahun terbaiknya sepanjang sejarah: pariwisata.

Angka-angkanya layak dibaca perlahan. Sepanjang 2025, lebih dari 1,5 miliar orang bepergian ke luar negaranya — rata-rata 219 ribu kedatangan internasional setiap hari. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dunia mencapai rekor US\$11,6 triliun, atau hampir 10 persen dari seluruh produk domestik bruto dunia, dengan pertumbuhan 4,1 persen — hampir satu setengah kali lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Belanja wisatawan



## PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

internasional mencapai US\$2,02 triliun, melampaui rekor sebelum pandemi. Untuk tahun 2026, kontribusi pariwisata diperkirakan naik lagi menjadi US\$12 triliun.

Yang paling penting bagi Indonesia adalah angka ketenagakerjaannya. Pariwisata dunia menopang 366 juta pekerjaan pada 2025 — satu dari sembilan pekerjaan di muka bumi — dan **satu dari tiga pekerjaan baru yang tercipta di dunia sepanjang tahun itu berasal dari pariwisata**. Dalam sepuluh tahun ke depan, sektor ini diperkirakan menciptakan hampir 89 juta pekerjaan baru, sekitar sepertiga dari seluruh pekerjaan baru dunia. Ketika mesin-mesin menggantikan pekerjaan di pabrik, pekerjaan pariwisata — melayani, memandu, memasak, mengantar, menjamu — justru tidak tergantikan, karena intinya adalah manusia melayani manusia.

## II. Kawasan ASEAN Bergerak Cepat — dan Indonesia Masih di Urutan Kelima

Kawasan Asia-Pasifik adalah pusat pertumbuhan pariwisata dunia: kontribusi pariwisata terhadap ekonomi kawasan tumbuh 8,1 persen pada 2025, tercepat di dunia, dengan nilai US\$3,29 triliun. Negara-negara ASEAN memperebutkan pasar yang sedang tumbuh itu dengan sungguh-sungguh: Malaysia membebaskan visa bagi wisatawan dari 158 negara dan mengeluarkan anggaran promosi terbesar dalam sejarahnya; Vietnam membebaskan hampir 40 negara tanpa mensyaratkan perlakuan timbal balik dan menuai pertumbuhan wisatawan tercepat di kawasan; Thailand membebaskan 93 negara. Hasil semester I 2026 di kawasan, berikut penerimaan devisanya, tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perkiraan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Penerimaan Devisa Pariwisata Enam Negara ASEAN, Semester I Tahun 2026**

| Negara           | Wisatawan mancanegara (Jan–Jun 2026) | Penerimaan devisa                  | Belanja per wisatawan           |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Thailand         | ±16 juta orang                       | ±US\$24 miliar (±Rp420 triliun)    | ±US\$1.480 (±Rp25,9 juta)       |
| Malaysia         | ±13 juta orang                       | ±US\$12–13 miliar (±Rp219 triliun) | ±US\$950 (±Rp16,6 juta)         |
| Vietnam          | 12,3 juta orang                      | ±US\$11–12 miliar (±Rp201 triliun) | ±US\$930 (±Rp16,3 juta)         |
| Singapura        | ±8,5 juta orang                      | ±US\$12 miliar (±Rp210 triliun)    | ±US\$1.450 (±Rp25,4 juta)       |
| <b>INDONESIA</b> | ±7,5 juta orang                      | ±US\$10 miliar (±Rp175 triliun)    | <b>US\$1.346 (±Rp23,6 juta)</b> |
| Filipina         | ±3 juta orang                        | ±US\$5–6 miliar (±Rp96 triliun)    | ±US\$1.900* (±Rp33 juta)        |

*Angka dibulatkan; sebagian merupakan perkiraan PKPEI berdasarkan data resmi yang tersedia (penjelasan pada bagian akhir). Konversi rupiah menggunakan kurs Rp17.500 per US\$. \*Belanja per wisatawan Filipina tampak tinggi karena sebagian besar tamunya adalah warga Filipina di luar negeri yang berkunjung dalam waktu lama, sehingga tidak sepenuhnya sebanding.*

Tabel di atas memuat dua pesan. **Pesan pertama** tidak menyenangkan: dari enam negara tujuan utama, Indonesia berada di urutan kelima dalam jumlah wisatawan — di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. **Pesan kedua** jarang dikemukakan: dalam penerimaan devisa, kedudukan Indonesia jauh lebih baik daripada kesan yang ditimbulkan urutan jumlah wisatawan. Belanja setiap wisatawan di Indonesia (US\$1.346, data resmi



## **PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA**

triwulan I) termasuk tertinggi di kawasan — sekitar 40 persen di atas Vietnam dan Malaysia. Karena itu, meskipun Vietnam menerima wisatawan 65 persen lebih banyak, penerimaan devisanya hanya lebih besar 15 sampai 20 persen dari Indonesia. Persoalan Indonesia dengan demikian sangat spesifik: bukan pada nilai, melainkan pada jumlah kunjungan — dan jumlah kunjungan ditentukan oleh kebijakan.

### **III. Keadaan Dalam Negeri: Sektor Riil Tertekan, Pariwisata Justru Tumbuh**

Ukuran persoalan ketenagakerjaan Indonesia paling tepat dibaca dari data pengangguran usia kerja, bukan sekadar dari berita PHK. Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Februari 2026 mencatat 7,24 juta penduduk usia kerja menganggur — jumlah yang hampir tidak berkurang dari tahun sebelumnya (hanya turun 35 ribu orang). Susunannya lebih mengkhawatirkan daripada jumlahnya: tingkat pengangguran usia muda 15–24 tahun mencapai 16,36 persen dan justru naik dibanding tahun lalu; pengangguran tertinggi menurut pendidikan adalah lulusan SMK (7,74 persen), dan tamatan SMA menyumbang porsi penganggur terbesar (28 persen) — padahal dua kelompok inilah yang seharusnya paling mudah terserap pasar kerja. Di luar mereka yang menganggur penuh, sepertiga penduduk yang bekerja berstatus tidak penuh: 25,97 persen bekerja paruh waktu dan 7,27 persen setengah menganggur. Sementara itu, 1,86 juta orang baru masuk pasar kerja setiap tahun — artinya perekonomian harus mencetak sekitar dua juta pekerjaan baru per tahun hanya untuk berdiri di tempat.

Tekanan itu diperberat oleh keadaan sektor riil. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari–Mei 2026. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur pada Maret 2026 turun ke 50,1 — terendah dalam delapan bulan — dan survei serikat pekerja menunjukkan 65 persen perusahaan tidak berencana merekrut karyawan baru. Rangkaian penutupan pabrik masih berlanjut sejak kebangkrutan produsen tekstil terbesar nasional yang berdampak pada lebih dari sepuluh ribu pekerja, disusul relokasi sejumlah pabrik elektronik dan alat musik ke luar negeri. Pemerintah menanggapi keadaan ini dengan sungguh-sungguh: pada Juni 2026, Presiden membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Namun satuan tugas menangani gejalanya; pertanyaan yang lebih mendasar adalah dari mana dua juta pekerjaan baru per tahun akan datang, ketika pabrik justru mengurangi pekerja.

Di tengah keadaan itu, terdapat satu bagian perekonomian yang bergerak ke arah sebaliknya. Pada triwulan I 2026, ketika ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen, lapangan usaha yang digerakkan pariwisata tumbuh jauh lebih tinggi: penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, jasa lainnya 9,91 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,04 persen. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Januari–Mei tercatat 6,07 juta, tumbuh 7,68 persen — tertinggi kedua di ASEAN. Belanja setiap wisatawan naik 5,36 persen. Pariwisata juga merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar nasional: 25,91 juta orang bekerja di sektor ini pada 2025, dan jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 26,53 juta pada 2026 — bertambah lebih dari setengah juta pekerjaan dalam setahun, pada saat sektor lain justru mengurangi pekerjaannya.

Sifat lapangan kerja pariwisata membuatnya tepat untuk keadaan sekarang. Pekerjaan pariwisata terbuka bagi lulusan SMP dan SMA — kelompok yang paling banyak terdampak penutupan pabrik padat karya; tersebar di seluruh daerah, tidak terpusat di kawasan industri;



## PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

cepat tercipta, karena hotel, rumah makan, dan jasa perjalanan menambah pekerja dalam hitungan bulan begitu tamu bertambah, bukan dalam hitungan tahun seperti pembangunan pabrik; dan tahan terhadap otomasi. Setiap tambahan wisatawan juga membawa devisa: satu juta wisatawan tambahan berarti sekitar US\$1,35 miliar atau Rp23,6 triliun masuk ke perekonomian, berputar dari hotel dan rumah makan hingga petani, nelayan, dan perajin yang memasok kebutuhannya.

### IV. Jalan Keluar yang Selama Ini Dikelola Setengah Hati

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk mencapainya di tengah tekanan sektor riil, diperlukan sumber pertumbuhan yang cepat menghasilkan, padat tenaga kerja, dan mendatangkan devisa. Uraian pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan pariwisata memenuhi ketiga syarat itu — dunia telah membuktikannya, kawasan sedang memperebutkannya, dan data dalam negeri menunjukkan sektor ini tumbuh bahkan tanpa dukungan penuh.

Justru di situlah letak persoalannya. Lembaga internasional menempatkan kekayaan alam dan budaya Indonesia pada peringkat kedua di ASEAN dan ke-22 di dunia — modal dasar yang tidak dimiliki negara tetangga mana pun. Namun dengan modal sebesar itu, Indonesia tetap berada di urutan kelima. Kesenjangan antara modal dan hasil tersebut tidak dapat dijelaskan selain sebagai kekurangan pada pengelolaan. Berdasarkan kajian PKPEI, kekurangan itu terpusat pada tiga kebijakan:

**Pertama, kebijakan visa.** Malaysia membebaskan 158 negara dan Vietnam hampir 40 negara dari kewajiban visa; Indonesia baru belasan negara, dan wisatawan dari negara lainnya dikenai biaya Rp500.000 per orang saat kedatangan. Bagi satu keluarga beranggota empat orang, biaya itu berarti Rp2 juta sebelum perjalanan dimulai — selisih yang cukup untuk memilih negara tetangga.

**Kedua, konektivitas penerbangan.** Jumlah rute dan kursi penerbangan langsung dari pasar yang sedang tumbuh pesat — India, Timur Tengah, Australia — menuju Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan menuju Bangkok atau Kuala Lumpur.

**Ketiga, skala promosi.** Negara yang berhasil menumbuhkan pariwisatanya lazim menganggarkan promosi sekitar US\$8,5 per wisatawan yang ditargetkan — ukuran yang merujuk pada Jepang, yang dalam lima belas tahun menaikkan jumlah wisatawannya dari 6 juta menjadi hampir 43 juta. Anggaran promosi Indonesia masih jauh di bawah ukuran itu.

Ketiganya adalah kebijakan, bukan keadaan alam; seluruhnya berada dalam kewenangan Pemerintah untuk diubah, dan pengalaman Vietnam menunjukkan hasilnya datang cepat: pembenahan visa yang sungguh-sungguh diikuti pertumbuhan kunjungan tercepat di kawasan.

### V. Solusi Konkret: Lima Keputusan Sebelum Oktober 2026

Waktu menjadi bagian dari solusi. Wisatawan dunia menetapkan tujuan liburan akhir tahunnya pada September–Oktober; kebijakan yang berlaku efektif Oktober akan menghasilkan kunjungan pada November–Desember, sedangkan yang tertunda hingga akhir tahun baru bekerja pada 2027. Selain itu, dua pesaing terbesar sedang melemah — Thailand





## PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

menurun, Malaysia hampir tidak tumbuh — sehingga paruh kedua 2026 adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. PKPEI mengusulkan lima keputusan:

- **Pembebasan visa tahap pertama, diputuskan pada triwulan III.** Membebaskan visa bagi sekelompok negara terpilih dengan nilai belanja wisatawan tertinggi dan risiko keimigrasian terkendali, disertai evaluasi menyeluruh setelah dua belas bulan. Perhitungan PKPEI menunjukkan devisa yang diperoleh dapat mencapai puluhan kali lipat penerimaan biaya visa yang hilang.
- **Penambahan penerbangan menjelang musim ramai.** Insentif bagi maskapai yang membuka rute dan menambah kursi dari India, Timur Tengah, Tiongkok, dan Australia mulai Oktober 2026.
- **Peningkatan promosi pada waktu yang tepat.** Pengalihan anggaran promosi ke kampanye Agustus–November yang menyasar wisatawan yang sedang menentukan tujuan liburan akhir tahun, termasuk yang selama ini memilih Thailand.
- **Penyelenggaraan acara pada akhir tahun.** Kalender kegiatan Oktober–Desember yang terpadu — festival, olahraga, konferensi — serta penawaran kunjungan lanjutan ke Indonesia bagi jutaan wisatawan yang singgah di Singapura.
- **Kesiapan destinasi dan pemantauan data.** Batas waktu pemeriksaan keimigrasian di bawah 30 menit di bandara utama, kesiapan destinasi di luar Bali, dan pemantauan data mingguan bersama BPS dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

## VI. Hasil yang Dapat Diukur pada Akhir Tahun

Apabila kelima keputusan tersebut diambil tepat waktu, hasilnya dapat diukur dengan jelas pada akhir 2026: jumlah wisatawan mancanegara mencapai 16,5 sampai 17 juta orang, batas atas target resmi; penerimaan devisa pariwisata mencapai US\$22 sampai 24,7 miliar atau sekitar Rp385 sampai 432 triliun — tertinggi sepanjang sejarah Indonesia; tenaga kerja pariwisata bertambah menuju 26,53 juta orang — lebih dari 600 ribu pekerjaan baru, setara sepertiga daya serap yang dibutuhkan seluruh pendatang baru pasar kerja nasional, justru pada tahun ketika sektor lain mengurangi pekerja; dan jumlah kunjungan triwulanan Indonesia melampaui Singapura, kenaikan peringkat pertama di kawasan dalam sepuluh tahun. Pencapaian-pencapaian ini sekaligus menjadi landasan bagi sasaran yang lebih besar: 40 juta wisatawan pada 2029 dan sumbangan yang berarti bagi target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

*Sasaran Indonesia bukanlah mengalahkan negara tetangga; Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura adalah mitra sekaligus pembanding yang patut dipelajari. Sasaran Indonesia adalah mencapai kedudukan yang sepadan dengan kekayaan alam dan budayanya sendiri: menjadi negara tujuan wisata terdepan di kawasan.*

## VII. Penutup

Sejarah ekonomi mencatat bahwa setiap zaman memiliki sumber pertumbuhannya. Ada masa ketika pertumbuhan datang dari komoditas, kemudian dari pabrik-pabrik. Data 2025–2026 menunjukkan dunia sedang memasuki masa ketika pertumbuhan dan pekerjaan baru datang



## PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

dari pariwisata: satu dari tiga pekerjaan baru dunia, dua triliun dolar belanja wisatawan, dan pertumbuhan hampir satu setengah kali ekonomi dunia. Negara-negara tetangga telah membaca perubahan itu dan bertindak. Indonesia memiliki modal yang lebih besar dari mereka semua, tetapi baru menggunakannya sebagian.

Pada saat 7,24 juta penduduk usia kerja menganggur, hampir satu dari enam orang muda tidak mendapatkan pekerjaan, dan hampir dua juta pendatang baru memasuki pasar kerja setiap tahun sementara pabrik-pabrik justru mengurangi pekerja, membiarkan sektor yang mampu menambah 600 ribu pekerjaan setahun dikelola setengah hati bukan lagi pilihan yang terus dipelihara. Lima keputusan yang diusulkan brief ini tidak menuntut anggaran besar; yang dituntutnya adalah kesungguhan dan kecepatan — sebelum Oktober 2026. Apabila keputusan itu diambil, tahun 2026 akan tercatat sebagai tahun ketika Indonesia berhenti menya-nyikan kekayaan terbesarnya, dan jutaan rakyat — para penganggur muda, lulusan SMA dan SMK yang menunggu kesempatan pertama, serta mereka yang baru kehilangan pekerjaan di pabrik — menemukan lapangan kerja di sektor yang oleh dunia telah dijadikan sumber pekerjaan masa depan.

### Catatan Metodologi dan Sumber Data

Angka global bersumber dari World Travel & Tourism Council (Economic Impact Research 2025–2026) dan UN Tourism (World Tourism Barometer). Angka ketenagakerjaan dalam negeri bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan (data PHK Januari–Mei 2026), BPS, dan pemberitaan resmi; angka tenaga kerja pariwisata bersumber dari BPS sebagaimana dikutip Kementerian Pariwisata. Sebagian besar angka pariwisata semester I 2026 merupakan perkiraan, karena data resmi bulan Juni belum terbit saat brief ini disusun; BPS merilisnya awal Agustus 2026. Angka Indonesia menggunakan data BPS Januari–Mei (6,07 juta kunjungan, tumbuh 7,68 persen) ditambah perkiraan Juni; belanja per wisatawan menggunakan data resmi triwulan I sebesar US\$1.345,61 per kunjungan. Angka negara tetangga diambil dari rilis resmi masing-masing; Vietnam telah merilis data enam bulan penuh, sedangkan Thailand, Malaysia, dan Singapura baru sebagian sehingga sisanya diperkirakan PKPEI. Perbandingan penerimaan devisa antarnegara bersifat perkiraan karena metode penghitungan setiap negara berbeda. Konversi rupiah menggunakan kurs Rp17.500 per US\$. Seluruh angka akan dimutakhirkan setelah data resmi terbit; rincian metode tersedia di PKPEI.

Jakarta, 3 Juli 2026

### Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia

*Center for Indonesian Economic & Tourism Studies*



**Muhammad Rahmad**

*Direktur Eksekutif*

*Hp. 081282050404*

*Policy brief ini disusun oleh Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia sebagai masukan independen bagi Pemerintah Republik Indonesia. Korespondensi: Direktur Eksekutif PKPEI, Graha Cempaka Mas Blok C 12A, Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640.*



## PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

### Tentang PKPEI

PKPEI — Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia — adalah lembaga kajian independen yang berfokus pada keterkaitan antara industri pariwisata dengan kebijakan ekonomi nasional. Riset PKPEI mencakup ekonomi pariwisata, daya saing destinasi, wisata bisnis dan MICE, diplomasi ekonomi yang melibatkan sektor pariwisata, serta reposisi Indonesia dalam arsitektur pariwisata global.

Policy Brief ini disusun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, European Commission, serta riset pasar dari lembaga-lembaga terpercaya seperti Astute Analytica, International Congress and Convention Association, dan European Travel Commission. Kunjungi PKPEI di <https://pusatkajianpariwisata.id>

### BOARD OF RESEARCHERS

Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia (PKPEI)  
Center for Indonesian Economic & Tourism Studies

| Nama / Name                                                           | Jabatan / Position                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dr. Muhammad Rahmad, S.Ag, S.Par, MM, MITM                            | Direktur Eksekutif / Koordinator Peneliti |
| Elyn Hastriana, BBA, M.Par                                            | Direktur / Peneliti                       |
| Assoc. Professor Dr. Rahmat Ingkadijaya, MM, QCRO                     | Peneliti Senior                           |
| Assoc. Professor Dr. Nurbaeti, MM, QRGF                               | Peneliti Senior                           |
| Assoc. Professor Dr. Arief F. Rachman, SST. Par, MT                   | Peneliti Senior                           |
| Assoc. Professor Hera Oktadiana, Ph.D, CHE                            | Peneliti Senior                           |
| Assoc. Professor Dr. Drs. Amrullah, SH, M. Hum, M. Si Par             | Peneliti Senior                           |
| Assoc. Professor Dr. Devita Gantina, SST. Par, M. Par                 | Peneliti Senior                           |
| Asst. Professor Agus Riyadi, SST. Par, M. Sc, Ph.D, CHIA, QCRO        | Peneliti Senior                           |
| Asst. Professor Dr. M. Husen Hutagalung, S. Pd, M. Si                 | Peneliti Senior                           |
| Asst. Professor Dr. Ir. Doni Muhandiansyah, M. Si., ERMCP, CERG, CCGO | Peneliti Senior                           |
| Asisten Ahli Dr (c) Rianto, SST. Par, M. Si Par                       | Peneliti Senior                           |
| Dr. Andi M Yasin, S.H., M.KN, C.L.A                                   | Peneliti Senior                           |

Para peneliti PKPEI merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki kedalaman pengalaman langsung di industri pariwisata, diplomasi internasional, serta pengembangan kebijakan publik. Setiap kajian berlandaskan teori dan metodologi ilmiah yang ketat, diperkaya wawasan praktis dari pengalaman puluhan tahun menangani dinamika pariwisata secara nyata.

*Policy Brief ini disusun oleh Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia sebagai kontribusi analisis kebijakan independen. Isi brief tidak merepresentasikan posisi resmi lembaga pemerintah manapun. **Untuk sitasi:** Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia (2026), "Satu Dari Tiga Pekerjaan Baru di Dunia Lahir Dari Pariwisata: Mengelola Pariwisata Indonesia Jangan Setengah Hati, Policy Brief No.08/PB/PKPEI/VII/2026*